

Pengecualian pajak hibah kendaraan bermotor (Kasus Hibah Badan Pangan Dan Pertanian Perserikatan Bangsa Bangsa Kepada Departemen Pertanian)

Aluisius Ari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20313758&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Sejak tahun 1970, banyak sekali bantuan asing masuk ke Indonesia dari berbagai Negara-negara asing maupun dari lembaga-lembaga asing. Bantuan asing tersebut tentu membawa kendaraan bermotor sebagai operasional pelaksanaan dari proyek lembaga maupun Negara asing tersebut di Indonesia. Setelah berakhirnya proyek pihak Negara maupun lembaga asing tersebut umumnya menghibahkan kendaraan proyek tersebut kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh departemen ataupun instansi yang terkait. Sejak tahun 2006 Badan Pangan dan pertanian perserikatan bangsa-bangsa atau disebut dengan UNFAO memberikan bantuan untuk penanganan Flu burung kepada Indonesia yang bekerjasama dengan departemen pertanian, sejak tahun 2011 proyek FAO akan segera berakhir, pihak UNFAO sendiri akan menghibahkan kendaraan bermotor dari proyek UNFAO kepada departemen pertanian yang mewakili pemerintah Republik Indonesia.

Sejak pemberlakuan Undang-undang pabean no 17 tahun 2006, semua barang khususnya kendaraan bermotor wajib dikenakan bea masuk, ppn, ppnbnm, dan pph pasal 21, namun menurut pasal 25 khusus badan asing maupun perwakilan asing dibebaskan dari bea masuk, ppn, ppnbnm, dan pph pasal 21. Ketika proyek tersebut berakhir, pihak asing akan menghibahkan kendaraan bermotor tersebut kepada departemen pertanian, dengan perubahan status kepemilikan, maka secara otomatis bea masuk, ppn, ppnbnm, dan pph pasal 21 akan muncul dan wajib dibayarkan oleh pihak departemen pertanian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah departemen pertanian dapat tidak membayarkan bea masuk, ppn, ppnbnm, dan pph pasal 21 sesuai undang-undang pabean no 17 tahun 2006, mengingat begitu besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh departemen pertanian untuk melakukan pembayaran bea masuk, ppn, ppnbnm, dan pph pasal 21 tersebut. Terlebih lagi biaya bea masuk, ppn, ppnbnm, dan pph pasal 21 sama bahkan lebih tinggi daripada nilai jual objek pajak kendaraan bermotor tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan undang-undang no 17 tahun 2006, sedangkan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan

Abstract

Since 1970, many foreign aid coming to Indonesia from various foreign countries and from foreign

institutions. Foreign aid would bring the motor vehicle as the operational implementation of projects and institutions of foreign countries in Indonesia. After the end of the project the State as well as foreign institutions are generally donated vehicles to the government of Indonesia project represented by departments or related institution. Since 2006 the Food and agricultural associations or nations called UNFAO provide assistance to the handling of bird flu to Indonesia in cooperation with the department of agriculture, since 2011 FAO project will soon be over, the UNFAO itself will donate vehicles to the department of project UNFAO agriculture representing the government of the Republic of Indonesia

Since the implementation of the Customs Act No. 17 of 2006, all goods, especially motor vehicle shall be subject to import duties, VAT, luxury sales, and article 21 pph, but according to the article 25 specific foreign or foreign representative bodies exempted from import duties, VAT, luxury sales, and pph Article 21. When the project ended, the foreign party will be donated the motor vehicle to the department of agriculture, which is a change in ownership status, it will automatically payment the VAT, luxury sales, and pph Article 21 will appear and must be pay by departemen agriculutre.

The purpose of this study was to determine whether the department of agriculture cannot pay the customs duties, VAT, luxury sales, and article 21 pph appropriate customs law No. 17 of 2006, given the amount of fees to be paid by the agricultural department to make payment of customs duties, VAT , luxury sales, and the article 21 pph. Moreover the cost of import duties, VAT, luxury sales, and article 21 pph at even higher than the selling value of the object of that motor vehicle tax

This study uses an empirical approach, juridical, to conduct an inventory of the positive law governing and pertaining to legislation No. 17 of 2006, while the data in this study were analyzed qualitatively, the secondary data in the form of the theory, the definition and

ix UNIVERSITAS INDONESIA

substance of the literature, and legislation, as well as primary data obtained from interviews, then analyzed with the laws, theories and opinions of relevant experts, in order to get conclusions on the implementation of corporate social responsibility